

**PENGARUH FUNGSI KOORDINASI APARATUR DALAM  
MENINGKATKAN EFEKTIFITAS ORGANISASI  
BADAN INVESTASI DAN PROMOSI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

Oleh :

**ISKANDAR MUDA PURBA**  
**NIM. 0011801059**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2003**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul : PENGARUH FUNGSI KOORDINASI APARATUR DALAM  
MENINGKATKAN EFEKTIFITAS ORGANISASI BADAN  
INVESTASI DAN PROMOSI PROPINSI SUMATERA  
UTARA**

**Nama : ISKANDAR MUDA PURBA**


**NPM : 0011801059**

**Menyetujui**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Drs. Subhilhar, MA.**

  
**Drs. Miftafuddin, MBA.**

**Direktur,**

**Drs. Heri Kusmanto, MA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Tesis ini Dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis  
Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik  
Universitas Medan Area**

**Pada Hari : Sabtu  
Tanggal : 5 April 2003  
Tempat : Ruang Sidang Program Pascasarjana  
Administrasi Publik Universitas Medan Area**

**Ketua : Drs. Usman Tarigan, MS**

**Sekretaris : Drs. Kariono, MA**

**Penguji I : Drs. Subhilhar, MA**

**Penguji II : Drs. Miftafuddin, MBA**

**Penguji Tamu : Drs. Murbanto Sinaga, MA**

## ABSTRAK

Selama perjalanan era Orde Baru yang sentralistik aparat daerah cenderung hanya menjadi “pelaksana” tugas-tugas pusat, tanpa ada ruang kewenangan yang ada. Namun sejak UU Otonomi Daerah tahun 1999 (UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No: 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah) telah menimbulkan kontroversi dan perdebatan yang sengit diberbagai kalangan masyarakat.

Jika dianalisis berbagai problem, potensi dan gambaran umum Sumatera Utara serta perkembangan Makro Ekonomi, sebenarnya iklim dan potensi pengembangan Investasi di daerah ini cukup prospektif, meskipun demikian kita tidak menafikan bahwa sangat banyak variabel atau faktor-faktor yang sangat berpotensi menimbulkan kondisi ketidakpastian terhadap kelangsungan iklim investasi (usaha), baik secara nasional maupun secara lokal.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Badan Investasi dan Promosi Sumatera Utara Terhadap Peningkatan Jumlah Investasi di Sumatera Utara. Penelitian ini secara umum dilakukan di Kantor Badan Investasi dan Promosi Propinsi Sumatera Utara dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui penyebaran Kuesioner (Angket), wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran Arsip, dokumentasi dan kepustakaan.

Data yang diperoleh, terkumpul, dipilih dan dianalisis secara teoritis dan empiris dan ditafsirkan secara logis sistimatis dengan menggunakan metode kuantitatif (statistik non parametrik/spearman-rho).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan Koordinasi Vertikal dan Koordinasi Horizontal yang dilakukan oleh Aparat Badan Investasi dan

Promosi Propinsi Sumatera Utara tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap Peningkatan Efektifitas Organisasi Badan Investasi dan Promosi Propinsi Sumatera Utara.

- Koordinasi Vertikal – Efektifitas Organisasi Badan Investasi dan Promosi ( $X_1 - Y$ ) = -0,298.
- Koordinasi Horizontal – Efektifitas Organisasi Badan Investasi dan Promosi ( $X_2 - Y$ ) = -0,076

Sedangkan Koefisien Determinasinya (KD) = 0,056. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel  $X_1$  dan  $X_2$  secara bersama-sama terhadap  $Y$  adalah sebesar 5,6 persen, sedangkan sisanya 94,4 persen dipengaruhi oleh variabel lain, seperti kondisi politik dalam negeri, keamanan dan ketertiban, ketidakpastian hukum, masalah perburuhan dan sebagainya.

Dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan Koordinasi yang dilakukan oleh aparat Badan Investasi dan Promosi Propinsi Sumatera Utara akan cenderung rendah pengaruhnya bahkan negatif dan tidak signifikan terhadap Efektifitas Organisasi Badan Investasi dan Promosi, apabila faktor-faktor yang lain seperti kondisi politik dan keamanan tidak kondusif, sehingga pada akhirnya kegiatan Koordinasi Badan Investasi dan Promosi tidak atau kurang bermanfaat.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan berkat serta Karunia-Nya sajalah penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana yang telah ditentukan.

Penyusunan tesis ini dikerjakan dalam maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam proses penyelesaian pendidikan Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik, di Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa proses perampungan tulisan ini banyak dibantu oleh berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Keluarga (Istri, anak-anak, orang tua/Mami dan Saudara-saudara kandung beserta Ipar) yang telah memberikan bantuan dan dorongan moril atau materil.
2. Direktur AKPAR Medan Drs. Amir Tanuamijaya, yang telah memberikan kesempatan melanjutkan Studi S2 (Pasca Sarjana), melalui pemberian Bea Siswa.
3. Kepada rekan-rekan seperjuangan Drs. Bahagia Tondang, SH. M.AP, Ign. Purwanggono, S. Sos, M.AP, Drs. Edison Sinurat, M.AP dan juga kepada Pimpro Bapak Drs. Rinto Taufik Simbolon.
4. Pimpinan Universitas Medan Area, Pimpinan Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik, Staf Dosen MAP dan secara khusus kepada

Bapak Drs. Suhilhar, MA dan H. Drs. Miftafuddin, MBA yang telah banyak membantu dalam proses penulisan tesis ini.

5. Pimpinan, Pejabat dan Staf Badan Investasi dan Promosi Propinsi Sumatera Utara yang telah mengizinkan penelitian ini dilakukan dan sekaligus pemberian data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Penulis secara jujur mengakui bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat yang terbaik. Oleh karena itu penulis mengharapkan akan ada saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan tulisan ini.

Akhir kata penulis berharap, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sebagai pelengkap dalam menjanlankan aktivitas kerja nantinya.

Medan, April 2003  
Penulis

Iskandar Muda Purba

## DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	10
1.4. Kerangka Pikir .....	11
1.5. Hipotesis.....	14
1.6. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TELAAH KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>17</b>
2.1. Pengertian Organisasi .....	17
2.2. Pengertian Koordinasi.....	22
2.3. Teori Efektivitas.....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
3.1. Metode Yang Digunakan .....	35
3.1.1. Rancangan Penelitian (Research Design) ..	35



3.1.2. Operasional Variabel Penelitian.....	36
3.1.3. Lokasi Penelitian .....	40
3.1.4. Populasi dan Sampel.....	40
3.1.5. Penarikan Sampel.....	41
3.1.6. Prosedur Pengumpulan Data.....	42
3.1.7. Rancangan Uji Hipotesis dan Analisis.....	43
<b>BAB IV GAMBAR UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	44
4.2. Visi dan Misi.....	52
4.3. Strategi Kebijakan .....	54
4.4. Program Badan Investasi dan Promosi Propinsi Sumatera Utara .....	57
4.5. Potensi Alam dan Lingkungan Hidup, Program dan Indikator Pembangunan.....	58
4.5.1. Potensi Alam dan Lingkungan Hidup .....	58
4.5.2. Program-program Pembangunan .....	63
4.5.3. Indikator Pembangunan .....	64
4.6. Tenaga Kerja, Program dan Indikator Pembangunan.....	64
4.6.1. Tenaga Kerja .....	64
4.6.2. Program-program Pembangunan .....	67
4.6.3. Indikator Pembangunan .....	70
4.7. Tugas dan Fungsi.....	70
4.7.1. Kepala Badan.....	70
4.7.2. Wakil Kepala Bagian .....	72

4.7.3. Sekretaris Badan .....	73
4.7.4. Kepala Bidang Perencanaan .....	76
4.7.5. Kepala Bidang Pelayanan.....	84
4.7.6. Kepala Bidang Bina Pelayanan .....	88
4.8. Tata Kerja.....	92

**BAB V PENYAJIAN DAN ANALISA DATA**

5.1. Penyajian Data .....	95
5.2. Analisa Data .....	115

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....** 120

6.1. Kesimpulan .....	120
6.2. Saran-saran .....	121

**DAFTAR PUSTAKA**



**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Keberadaan Bangsa Indonesia pada saat ini, setelah berbagai peristiwa politik dan pergantian Pimpinan Nasional silih berganti, maka terbentuk Kabinet Gotong Royong yang unsur pemerintahannya terdiri dari berbagai unsur dan komponen bangsa yang dianggap dapat mewakili elemen masyarakat dan berpotensi tinggi. Dan saat ini telah memasuki tahun kedua dan sedang memusatkan perhatiannya pada Program Pembangunan Nasional, tentunya sangat menarik untuk diamati perkembangannya.

Dalam mencapai tujuan Nasional khususnya menyangkut Pembangunan Ekonomi Nasional, setiap Negara atau Kepala Pemerintahan mempunyai cara dan metode sendiri-sendiri di dalam merealisasinya. Negara Republik Indonesia pada saat ini dikategorikan sebagai negara miskin atau negara sedang berkembang (*Develoving Country*) dan sudah pasti menghadapi berbagai masalah. Tentunya masih dalam suatu kewajaran apabila masalah dan tantangan akan selalu menghadang Program Pembangunan Nasional setiap negara, khususnya pada negara-negara yang sedang berkembang.

Seperti diketahui bahwa hingga saat ini Pemerintah Indonesia masih terus mengharapkan devisa negara dari Sektor Migas (minyak dan gas), dan untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Indonesia selalu berusaha mencari berbagai alternatif. Hal ini dilakukan agar tercipta terobosan baru untuk menanggulangi krisis ekonomi yang terus masih berkepanjangan hingga saat ini.

Alternatif yang telah diralisasikan oleh pemerintah misalnya peningkatan Pendapatan Negara dari Sektor Perpajakan seperti berbagai Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Selain Peraturan Daerah (Perda) yang juga sangat banyak ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota) sebagai konsekwensi Otonomi Daerah, antara lain :

1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. PP. No. 35 Tahun 1983 tentang Pendapaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Pengajuan Keberatan.
3. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan UU Pajak Penghasilan 1984.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gibson, James L. Ivancericn, and Donneley, *Organization*, diterjemahkan oleh Djoerban Wahid, Erlangga, Jakarta, 1994.
- Hani Handoko T, *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 1984.
- Harold Koontz, et, al., *Intisari Manajemen*, Penerjamah : Drs. A. Hasym Ali, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Indrawijaya Adam, *Perilaku Administrasi*, Bandung Sinar Baru, 1989.
- Manullang M., *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Panglaykin dan Hazil, *Management Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- Seokarno, *Dasar-Dasar Manajemen*, Miswar, Jakarta, 1985.
- Siagian, Sondang P, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung, 1982.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta (LP3S), 1989.
- Strets, Richard M, *Efektifitas Organisasi*, Diterjemahkan oleh Magdalena Yamin, Jakarta Erlangga, 1985.
- Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.

Himpunan Peraturan Penanaman Modal, BKPM, Jakarta, 2002.

SK. Menteri Investasi/Kepala BPKM, Nomor 37/SK/1999.

SK. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Nomor : 5700/3043/K/Tahun 1999.

Media Cetak

Waspada, Medan, Januari 2003.